



e-ISSN 2798-8260

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-11

Studi Komparatif Reformasi Birokrasi: Efektivitas Kualitas Pelayanan Publik dan Efisiensi Anggaran di Vietnam dan Indonesia

Brilliant Dwi Cahya, Lilo Sanjaya*, Saiful Amri, Ridwan

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas reformasi birokrasi di Vietnam dan Indonesia, khususnya dalam aspek kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa kedua negara mengadopsi strategi reformasi yang berbeda secara signifikan. Vietnam menempuh jalur perampingan birokrasi dan digitalisasi pelayanan, sedangkan Indonesia memilih ekspansi kelembagaan dengan penambahan kementerian. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor efektivitas pemerintahan yang lebih tinggi dalam jangka pendek, sementara Vietnam unggul dalam efisiensi prosedur layanan dan inovasi digital. Meski demikian, kedua negara menghadapi tantangan dalam memastikan reformasi berdampak luas dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kombinasi antara efisiensi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Efisiensi Anggaran, Vietnam, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2675>

*Correspondence: Lilo Sanjaya

Email:

lilosanjaya7@gmail.com

Received: 28-04-2025

Accepted: 28-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to compare the effectiveness of bureaucratic reform in Vietnam and Indonesia, particularly in terms of public service quality and budget efficiency. Using a qualitative approach through literature study and secondary data analysis, this research found that both countries adopt significantly different reform strategies. Vietnam pursues bureaucratic streamlining and service digitalization, while Indonesia chooses institutional expansion by adding ministries. The results show that Indonesia has a higher government effectiveness score in the short term, while Vietnam excels in service procedure efficiency and digital innovation. Nevertheless, both countries face challenges in ensuring reforms have broad and sustainable impacts. This study recommends the need for a combination of structural efficiency and institutional capacity building to realize an adaptive, responsive bureaucracy oriented toward quality public services.

Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service, Budget Efficiency, Vietnam, Indonesia

Pendahuluan

Birokrasi merupakan sebuah sistem pengorganisasian yang terstruktur yang bertujuan untuk mengkoordinasi pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Birokrasi berperan dalam menjaga keteraturan agar semua yang berada dalam struktur organisasi atau lembaga tersebut dapat berjalan sesuai semestinya berdasarkan aturan yang telah disepakati Tjokroamidjojo dalam (Muhammad, 2018). Menurut Max Weber (dalam

Kusumah et al, 2024) birokrasi memiliki beberapa tipe ideal diantaranya yaitu adanya pembagian kerja dan spesialisasi agar para pekerja dapat bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing, lalu adanya standarisasi dan formalisasi yang dimana adanya aturan yang mengikat untuk memastikan semua bekerja sesuai aturan yang telah ada, hierarki yang berjenjang yang mengatur secara jelas wewenang dan tugas dari atas ke bawah, profesionalisasi yang berarti tidak adanya hubungan pribadi dalam hal kinerja, dan kesempatan bagi pegawai untuk jenjang karirnya.

Dalam sistem pemerintahan, birokrasi memiliki kaitannya dengan pelayanan publik yang dimana birokrasi merupakan sistem administrasi dalam lembaga atau struktur organisasi pemerintahan yang berfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pemberian pelayanan publik berdasarkan aturan yang ada (Hendrayady et al, 2022). Pada suatu organisasi maupun lembaga pemerintahan, reformasi birokrasi merupakan sebuah hal yang diperlukan sebagai upaya memperbaiki suatu struktur maupun fungsinya.

Pada suatu organisasi maupun lembaga pemerintahan, reformasi birokrasi merupakan sebuah hal yang diperlukan sebagai upaya memperbaiki suatu struktur maupun fungsinya. Pada tahun 2025, Vietnam melakukan reformasi birokrasi dengan merampingkan jumlah kementeriannya. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat dari investor agar bisa menarik investasi di negara tersebut tanpa alur birokrasi yang dapat mempersulit investor. Selain itu reformasi birokrasi dapat menekan biaya operasional kementerian, yang dimana biaya operasional kementerian yang dihilangkan maupun di gabung dapat dialihkan kedalam sektor-sektor lainnya.

Berbeda dengan Vietnam, Indonesia justru melakukan hal sebaliknya yang dimana terjadinya ekspansi terhadap kementerian. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan daftar para menteri dalam kabinet merah putih. Hal tersebut bertujuan agar fokus yang dilakukan oleh masing-masing kementerian bisa lebih jelas. Hal tersebut menjadi alasan penelitian kami, untuk mengetahui efektivitas reformasi birokrasi pada sektor kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran dari kedua negara tersebut yang saling melakukan reformasi birokrasi tetapi sangat berlawanan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Winaldi (2020), Vietnam lebih unggul dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan khususnya pelayanan dalam hal membuka bisnis atau *starting a business* dibandingkan Indonesia dilihat dari segi biaya dan prosedur karena membutuhkan instansi yang lebih sedikit daripada Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pelayanan dalam hal *starting a business* dan belum membahas efektivitas reformasi birokrasi pada sektor kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran.

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mursalin et al. (2024), implementasi reformasi birokrasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini sudah membahas efektivitas reformasi birokrasi pada sektor kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran yang ada di Indonesia tetapi belum membandingkannya dengan reformasi birokrasi yang ada di Vietnam.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas beberapa poin penting yang perlu dikaji lebih dalam untuk memahami secara rinci perbandingan reformasi birokrasi antara

Indonesia dan Vietnam mengenai kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran, dengan tetap menjaga pembahasan agar tidak terlalu melebar. Adapun pembahasan penulis meliputi dua aspek utama yaitu perbandingan efektivitas kualitas pelayanan publik dari Negara Vietnam dan Indonesia serta perbandingan efisiensi anggaran antara Vietnam dan Indonesia dalam reformasi birokrasi pada struktur kementerian atau lembaga.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1992), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati, serta perilaku yang dapat dianalisis dalam konteks yang alami. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang membahas isu reformasi birokrasi di Indonesia dan Vietnam.

Teknik pengambilan data dilakukan secara *purposive*, dengan menggunakan strategi *critical case sampling*, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan relevansi dan nilai kritisnya terhadap topik yang diteliti.

Dalam proses analisis data, penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang melibatkan tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yang mencakup penghimpunan informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur. Selanjutnya dilakukan reduksi data, yaitu proses penyaringan, pemilihan, dan penyederhanaan data untuk memperoleh fokus yang lebih tajam terhadap isu yang diteliti. Tahap terakhir adalah penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis guna memudahkan peneliti dalam memahami dan menarik kesimpulan dari hasil temuan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika reformasi birokrasi dan implikasinya terhadap pelayanan publik di kedua negara.

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Efektivitas Kualitas Pelayanan Publik di Vietnam dan Indonesia

Analisis perbandingan efektivitas kualitas pelayanan publik antara Vietnam dan Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan reformasi birokrasi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kedua negara memiliki strategi yang berlawanan dalam implementasi reformasi birokrasi, dimana Vietnam menerapkan pendekatan perampingan struktur birokrasi sementara Indonesia melakukan ekspansi kelembagaan.

Analisis Indikator Efektivitas Pemerintahan

Berdasarkan data Worldwide Governance Indicators (WGI) World Bank tahun 2023, terdapat perbedaan yang menarik antara kedua negara dalam hal efektivitas pemerintahan. Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam skor Government Effectiveness Index dengan mencatat skor 0,58 poin pada tahun 2023, meningkat dari 0,44 poin pada tahun 2022, dengan peringkat persentil sebesar 69,81%. Sementara itu, Vietnam memiliki Government Effectiveness Score sebesar 0,126 poin dengan Percentile Rank sebesar 56,13% pada tahun 2023.

Pencapaian Indonesia ini menunjukkan perbaikan yang konsisten dibandingkan rata-rata historis Indonesia dari tahun 1996-2023 yang hanya -0,19 poin. Meskipun Vietnam menerapkan strategi perampingan birokrasi yang secara teoritis seharusnya lebih efisien, skor efektivitas pemerintahannya masih berada di bawah Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan ekspansi kelembagaan Indonesia dalam jangka pendek memberikan hasil yang lebih baik dalam hal efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Tabel 1. Perbandingan Indikator Efektivitas Pemerintahan

Indikator	Indonesia	Vietnam	Sumber
Government Effectiveness Score (2023)	0,58 poin	0,126 poin	World Bank WGI
Government Effectiveness Percentile Rank (2023)	69,81%	56,13%	Trading Economics
Public Services Index (2024)	5,6 poin	Tidak tersedia	The Global Economy
Tren Public Services Index	Menurun (5,9→5,6)	Tidak tersedia	The Global Economy
Ease of Doing Business Rank (2017)	Tidak tersedia	68th place	World Bank
Provincial Governance Index (PAPI) 2023	Tidak tersedia	46,04 poin (tertinggi)	UNDP Vietnam

Analisis Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Sektor

Data mengenai kualitas layanan publik menunjukkan kompleksitas yang berbeda pada masing-masing negara. Indonesia memiliki Public Services Index sebesar 5,6 poin pada tahun 2024, mengalami penurunan dari 5,9 poin pada tahun 2023, dengan skala 0 (tinggi) - 10 (rendah). Meskipun skor ini masih di atas rata-rata dunia sebesar 5,33 poin, tren penurunan menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Vietnam menunjukkan kemajuan dalam indeks Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) 2023, dengan Thua Thien-Hue Province mencapai skor tertinggi 46,04 poin, diikuti Thai Nguyen (45,78 poin) dan Bac Ninh (45,7 poin). PAPI yang dikelola oleh UNDP sejak 2009 mengukur pengalaman dan persepsi warga negara terhadap kinerja dan kualitas implementasi kebijakan serta pemberian layanan dari 63 pemerintah provinsi di Vietnam.

Dalam aspek pelayanan bisnis, penelitian Winaldi (2020) menunjukkan bahwa Vietnam memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Indonesia. Vietnam berhasil meningkatkan posisinya dalam indeks Ease of Doing Business dari peringkat 104 pada tahun 2007 menjadi peringkat 68 pada tahun 2017. Vietnam lebih unggul dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan khususnya pelayanan dalam hal membuka bisnis atau *starting a business* dibandingkan Indonesia dilihat dari segi biaya dan prosedur karena membutuhkan instansi yang lebih sedikit daripada Indonesia.

Analisis Digitalisasi dan Modernisasi Layanan

Dari perspektif digitalisasi layanan publik, kedua negara menunjukkan pendekatan yang berbeda. Indonesia masih berada di peringkat menengah dalam Online Service Index (OSI), sejajar dengan Belarus, Bolivia, Mesir, dan Nepal, serta masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia melakukan ekspansi kelembagaan, implementasi teknologi dalam pelayanan publik masih memerlukan perbaikan.

Vietnam telah menerapkan digitalisasi layanan publik sebagai bagian dari strategi perampingan birokrasi. Pemerintah Vietnam memiliki beberapa inisiatif yang sedang berlangsung untuk mengimplementasikan reformasi administrasi, seperti membangun platform e-government dan layanan satu pintu (*single-window services*). Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur birokrasi serta penerapan teknologi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan (Satispi et al, 2024).

Analisis Berdasarkan Model SERVQUAL

Menggunakan kerangka analisis SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), perbandingan kualitas pelayanan publik kedua negara dapat dianalisis dari lima dimensi utama:

- *Tangibles* (Penampilan Fisik): Indonesia dengan pendekatan ekspansi kelembagaan berpotensi memiliki infrastruktur fisik yang lebih tersebar, namun hal ini juga berarti duplikasi fasilitas yang dapat mengurangi efisiensi. Vietnam dengan pendekatan perampingan cenderung memiliki konsentrasi fasilitas yang lebih optimal dan terintegrasi melalui platform digital.
- *Reliability* (Keandalan): Peningkatan skor Government Effectiveness Index Indonesia pada tahun 2023 dibandingkan 2022 menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan mulai memberikan hasil. Vietnam menunjukkan konsistensi dalam PAPI score yang mencerminkan stabilitas kinerja pemerintahan daerah.

- *Responsiveness* (Responsivitas): Vietnam menunjukkan responsivitas yang lebih baik dalam layanan bisnis, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan signifikan dalam Ease of Doing Business ranking dari 104 menjadi 68 dalam periode 2007-2017. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal responsivitas, tercermin dari penurunan Public Services Index.
- *Assurance* (Jaminan dan Kompetensi): Kedua negara masih menghadapi tantangan dalam dimensi ini. Indonesia mengalami penurunan Public Services Index dari 5,9 menjadi 5,6, sementara Vietnam dengan skor Government Effectiveness yang lebih rendah (0,126 vs 0,58) menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas institusional.
- *Empathy* (Kepedulian): Pendekatan New Public Service (NPS) yang dikembangkan Denhardt dan Denhardt (2000) lebih terlihat pada strategi Indonesia yang berusaha menciptakan fokus yang lebih jelas melalui ekspansi kementerian. Vietnam menunjukkan kepedulian melalui sistem PAPI yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam evaluasi kinerja pemerintah.

Sintesis dan Evaluasi Komparatif

Berdasarkan analisis data komprehensif dan kerangka teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dalam implementasi reformasi birokrasi:

Keunggulan Indonesia:

1. Skor Government Effectiveness yang lebih tinggi (0,58 vs 0,126)
2. Peningkatan signifikan dalam efektivitas pemerintahan (2022-2023)
3. Pendekatan ekspansi kelembagaan yang memberikan fokus spesialisasi

Keunggulan Vietnam:

1. Efisiensi dalam layanan bisnis (Ease of Doing Business ranking)
2. Sistem evaluasi kinerja yang partisipatif (PAPI)
3. Integrasi digitalisasi dalam perampangan birokrasi
4. Konsistensi dalam implementasi reformasi administrasi

Indonesia dengan pendekatan ekspansi kelembagaan menunjukkan peningkatan efektivitas pemerintahan dalam jangka pendek, namun menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas layanan publik yang konsisten. Sebaliknya, Vietnam dengan pendekatan perampangan birokrasi menunjukkan efektivitas yang lebih baik dalam layanan spesifik seperti kemudahan berusaha dan implementasi e-government, namun skor efektivitas pemerintahan secara keseluruhan masih berada di bawah Indonesia.

Kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dengan Indonesia unggul dalam efektivitas pemerintahan secara umum dan Vietnam unggul dalam efisiensi layanan bisnis serta inovasi digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mursalin et al. (2024) yang menyatakan bahwa implementasi reformasi birokrasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pendekatan, konsistensi implementasi, dan konteks spesifik yang dilakukan oleh masing-masing negara.

Dalam konteks jangka panjang, pendekatan Vietnam yang menekankan perampingan dan digitalisasi berpotensi memberikan efisiensi yang lebih berkelanjutan, sementara pendekatan Indonesia memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa ekspansi kelembagaan tidak menghasilkan duplikasi fungsi dan pemborosan sumber daya.

Perbandingan Efisiensi Anggaran antara Vietnam dan Indonesia dalam Reformasi Birokrasi pada Struktur Kementerian atau Lembaga

Vietnam melakukan efisien anggaran mereka dengan melakukan penyatuan antar satu kementerian dengan kementerian lain maupun lembaga pemerintahan dan pemangkasan jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan yang berawal dari 30 menjadi 22. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan publik yang diberikan lebih cepat dan efisien tanpa harus berbelit alur birokrasi yang lebih panjang dari sebelumnya. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam mengurangi sekitar kurang lebih 100.000 pegawai negeri, 22.000 jabatan termasuk pemangkasan 30 sampai 40% pada struktur lapisan menengah, serta penghapusan sejumlah entitas seperti 519 direktorat dan 219 departemen di tingkat pemerintahan pusat. Hal tersebut akan membuat Vietnam menghemat anggaran negara dalam lima tahun kedepan sampai 4,5 miliar USD , jika dalam rupiah sekitar Rp72,5 triliun. Akan tetapi dalam masa transisi ini, pemerintah Vietnam harus mengeluarkan sekitar 80 miliar USD atau sekitar kurang lebih Rp80 triliun untuk membayarkan uang kompensasi bagi pegawai yang terkena dampak dari perampingan kementerian dan lembaga pemerintahan.

Berbeda dengan langkah yang diambil oleh pemerintah negara Indonesia yang melakukan penggemukan pada badan kementerian yang berawal dari 34 menjadi 48 kementerian. Hal tersebut dapat mengurangi beban kerja dan memfokuskan tugas kementerian. Akan tetapi dengan adanya penggemukan jumlah kementerian, Presiden Prabowo Subianto melakukan instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja pada APBN maupun APBD tahun 2025. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah membuat negara dapat menghemat hingga Rp 306,69 triliun yang meliputi efisiensi belanja kementerian atau lembaga sejumlah Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sejumlah Rp 50,59 triliun. Tidak hanya itu, langkah penghematan juga dilakukan pada belanja di non-operasional, meliputi bantuan negara, pembangunan prasarana, serta pengadaan mesin dan peralatan. Kebijakan pembatasan juga menyasar kegiatan bernilai prioritas rendah, meliputi kegiatan seremonial, studi banding, penerbitan, dan forum diskusi terfokus. Akan tetapi, pengeluaran untuk belanja pegawai dan program bantuan sosial tidak menjadi bagian dari upaya efisiensi pemerintah.

Simpulan

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Vietnam dan Indonesia menunjukkan pendekatan yang berbeda namun sama-sama bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan efisiensi pelayanan publik. Vietnam cenderung mengutamakan perampingan struktur birokrasi dan digitalisasi layanan sebagai strategi utama, yang

berdampak positif pada efisiensi anggaran serta kemudahan izin usaha. Di sisi lain, Indonesia memilih pendekatan ekspansi kelembagaan untuk memperjelas fokus kerja kementerian, yang terbukti meningkatkan skor efektivitas pemerintahannya secara keseluruhan.

Implikasi Penting dari Temuan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang optimal dalam reformasi birokrasi, melainkan efektivitas reformasi sangat bergantung pada konteks negara, kapasitas institusional, dan konsistensi implementasi. Pendekatan Vietnam yang menekankan efisiensi struktural memberikan hasil positif dalam jangka menengah untuk layanan bisnis dan penghematan anggaran, sementara pendekatan Indonesia yang menekankan spesialisasi kelembagaan memberikan peningkatan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan dalam jangka pendek.

Secara praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa kedua negara perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi reformasi yang dipilih. Vietnam perlu memperkuat kapasitas institusional agar efisiensi struktural tidak mengorbankan kualitas layanan, sedangkan Indonesia harus memastikan bahwa ekspansi kelembagaan tidak menyebabkan duplikasi fungsi dan pemborosan sumber daya.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian longitudinal yang mengukur dampak jangka panjang dari kedua pendekatan reformasi terhadap kepuasan masyarakat dan kinerja ekonomi nasional
2. Studi komparatif yang melibatkan negara-negara ASEAN lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang model reformasi birokrasi di kawasan
3. Penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di kedua negara
4. Analisis cost-benefit yang lebih mendalam terhadap implementasi digitalisasi layanan publik di negara berkembang

Rekomendasi Praktis

Untuk Indonesia, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap lembaga-lembaga yang telah dibentuk, mempercepat integrasi sistem pelayanan publik secara digital, serta mengarahkan kebijakan anggaran berdasarkan pencapaian kinerja yang terukur. Vietnam di sisi lain perlu memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi agar efisiensi yang tercapai tidak mengorbankan akuntabilitas.

Kedua negara perlu menyadari bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan secara struktural, tetapi juga harus menyangkut perubahan budaya birokrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai dengan komitmen politik yang kuat, konsistensi implementasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang robust untuk memastikan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adit, A., & Iswara, A. J. (2025, February 11). Efisiensi anggaran Vietnam: Pemerintah hemat Rp 72 triliun, pangkas 8 K/L. Kompas.com. <https://internasional.kompas.com/read/2025/02/11/174400570/efisiensi-anggaran-vietnam--pemerintah-hemat-rp-72-triliun-pangkas-8-k?>
- Barzelay, M. (2001). *The new public management: Improving research and policy dialogue*. University of California Press.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Allyn and Bacon.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059-1066.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Dunleavy, P., & Hood, C. (1994). From old public administration to new public management. *Public Money & Management*, 14(3), 9-16.
- Hardiantoro, A. (2025, March 19). Vietnam bakal kurangi jumlah provinsi untuk efisiensi anggaran. Kompas.com. <https://amp.kompas.com/tren/read/2025/03/19/181500765/index.html?>
- Hendrayady, A., Arman., Satmoko, N. D., Afriansyah., Heriyanto., Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin., Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Razak, M. R. R. (2022). *Pengantar ilmu administrasi publik*. Eureka Media Aksara.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (2019). *Birokrasi pemerintahan dan perkembangannya*. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/601/1/3.%20BUKU%20BIROKRASI%20PEMERINTAHAN%20dan%20PERKEMBANGANNYA.pdf>
- Kettl, D. F. (2000). *The global public management revolution: A report on the transformation of governance*. Brookings Institution Press.
- Kompas.id. (2023, October 4). Government Effectiveness Index Score Improves. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/10/04/en-skor-indeks-efektivitas-pemerintah-membaik-reformasi-birokrasi-harus-berkelanjutan>
- Kompasiana. (2025, January 24). Efisiensi anggaran: Kunci menuju reformasi birokrasi yang lebih baik. <https://www.kompasiana.com/rizalabdillah8850/67b29199c925c409674e92e2/efisiensi-anggaran-kunci-menuju-reformasi-birokrasi-yang-lebih-baik>
- Kusumah, F. A., Cokro, M., Salsabila, N., Harywibowo, R., & Aji, M. P. (2024). Analisis tipe ideal birokrasi dengan konsep birokrasi Weber di Kantor Walikota Jakarta Utara. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 82–90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11105597>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Muhammad. (2018). *Birokrasi: Kajian konsep, teori menuju good governance*. Unimal Press.
- Mursalin, M., Natsir, N., & Anas, M. (2024). Efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik. *Student Research Journal*, 2(4), 397–406. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1426>
- OECD. (2017). *Government at a glance 2017*. OECD Publishing.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Peters, B. G. (2001). *The future of governing*. University Press of Kansas.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public management reform: A comparative analysis - New public management, governance, and the neo-Weberian state*. Oxford University Press.
- Pratubangsawans, I. (2011). *Model reformasi birokrasi Indonesia*. <https://irwanpratubangsawans.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/model-reformasi-birokrasi-indonesia.pdf>
- ResearchGate. (2017). The impact of e-government system on public service quality in Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/322375499_The_Impact_of_E-Government_System_on_Public_Service_Quality_in_Indonesia
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Satispi, E., Izzatusholekha, I., Rahman, A., Habibi, F., & Selvira, R. (2024). Optimalisasi efisiensi penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Administrasi dan Kebijakan*, 5(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/22136>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, October 22). Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih. <https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/>
- Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.
- Suryo, D. (2025, February 10). Efisiensi APBN-APBD 2025, ini point penghematan yang diteken Prabowo hingga Rp306,69 triliun. *Kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/nasional/572811/efisiensi-apbn-apbd-2025-ini-point-penghematan-yang-diteken-prabowo-hingga-rp306-69-triliun?page=all>
- Tampubolon, R. P. (2025, February 8). Penambahan jumlah kementerian dan efisiensi pemerintahan Prabowo. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/08/07000061/penambahan-jumlah-kementerian-dan-efisiensi-pemerintahan-prabowo?page=all>

-
- TheGlobalEconomy. (2024). Indonesia Government effectiveness. https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_government_effectiveness/
- TheGlobalEconomy. (2024). Indonesia Public services index. https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/public_services_index/
- TIMES Indonesia. (2025, March 10). Analisis efisiensi anggaran pemerintah. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/527869/analisis-efisiensi-anggaran-pemerintah>
- Trading Economics. (2024). Indonesia - Government Effectiveness: Percentile Rank. <https://tradingeconomics.com/indonesia/government-effectiveness-percentile-rank-wb-data.html>
- Trading Economics. (2024). Vietnam - Government Effectiveness: Percentile Rank. <https://tradingeconomics.com/vietnam/government-effectiveness-percentile-rank-wb-data.html>
- Vigoda-Gadot, E., & Meiri, S. (2008). New public management values and person-organization fit: A socio-psychological approach and empirical examination among public sector personnel. *Public Administration*, 86(1), 111-131.
- Winaldi, I. (2020). Perbandingan reformasi birokrasi pelayanan publik di Vietnam dan Indonesia (Studi kasus prosedur dalam memulai bisnis). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 25-32.